

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Magelang

2.1.1. Letak dan Batas Wilayah

Kota Magelang merupakan daerah strategis yang terletak pada persilangan jalur transportasi utama Semarang-Yogyakarta, jalur kegiatan ekonomi Semarang-Yogyakarta-Purworejo dan jalur wisata Yogyakarta Borobudur Kopeng dan dataran tinggi Dieng. Kota Magelang merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Tengah yang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Magelang sehingga semua batas daerah Kota Magelang merupakan wilayah administratif Kabupaten Magelang. Adapun batas wilayah Kota Magelang sebelah utara yaitu berbatasan dengan Kecamatan secang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bandongan dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Tegalrejo. Secara topografis Kota Magelang merupakan dataran tinggi yang berada 380 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan berkisar 5° sampai 45° sehingga Kota Magelang merupakan wilayah bebas banjir. Klimatologi Kota Magelang dikategorikan daerah beriklim basah dengan temperatur bervariasi antara 20° C sampai 29° C, adapun curah hujan 8,16 mm/ hari, tahun 2016 hari hujan banyak terjadi pada bulan januari dengan hari hujan sebanyak 24 hari.

2.1.2. Kondisi Geografis

Kota Magelang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan berada pada posisi yang strategis karena keberadaannya yang terletak di tengah - tengah, sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara geografis provinsi Jawa Tengah terletak antara 5° 40' dan 8° 30' Lintang Selatan dan antara 108° 30' dan 111° 30' Bujur Timur, adapun jarak terjauh dari Barat ke Timur yaitu 263 km dan dari Utara Ke Selatan 226 km. Jawa tengah secara administratif terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari keseluruhan luas pulau jawa. Sedangkan secara geografis, Kota Magelang terletak pada 7° 26'18" dan 7° 30'9" Lintang Selatan dan antara 110° 12'30" dan 110° 12'52" Bujur Timur.

2.1.3 Visi dan Misi Kota Magelang

Visi Kota Magelang tahun 2016 - 2021 adalah “ Terwujudnya Kota Magelang Sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang Dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan Relegius” Komponen visi diterjemahkan sebagai berikut :

1. Kota Jasa: Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta

sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan dan sektor pendidikan.

2. Kota Modern: Modern berarti suatu kondisi lebih maju dari pada yang lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada.
3. Kota Cerdas: Kota cerdas terwujud dalam kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi, dan dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Kota cerdas memuat unsur-unsur:
 - 1) *Smart Governance* yaitu: Pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
 - 2) *Smart infrastructure* yaitu pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT
 - 3) *Smart Economy*, yaitu: Pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan *e-commerce*
 - 4) *Smart environment* yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan DSA berbasis IT, pengembangan sumber energi terbarukan
 - 5) *Smart people* yaitu : pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat

- 6) *Smart living* yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.
4. Masyarakat Sejahtera: Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya mensejahterakan masyarakat melalui optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.
5. Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanan dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah. Masyarakat religius yang akan dicapai tahun 2016-2021 sebagai penyiapan landasan terbentuknya masyarakat madani di tahun 2025, yang ditandai dengan kebiasaan dialog timbal balik warga dengan pemerintah di ruang publik yang luas, kehidupan demokratis bagi warga, toleransi atau saling menghargai dalam kehidupan masyarakat, sikap masyarakat yang tulus menerima perbedaan yang ada di masyarakat dan keadilan sosial bagi warga.

Berdasarkan Visi kota Magelang tersebut ditetapkan misi pembangunan kota Magelang sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintah daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunya masyarakat madani

2.1.4. Wilayah Kecamatan di Kota Magelang

Kota Magelang memiliki luas daerah 18.120 kilometer persegi yang terbagi menjadi tiga Kecamatan administratif, yaitu Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan

dengan luas wilayah berturut-turut 6.128 km² , 5.104 km² , dan 6.888 km². Kota Magelang terdiri dari 3 Kecamatan, dan 17 Kelurahan dengan wilayah meliputi :

1. Kecamatan Magelang Utara terdiri dari Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Potrobangsari dan Kelurahan Wates.
2. Kecamatan Magelang Tengah terdiri dari Kelurahan Cacaban, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Magelang, Kelurahan Panjang dan Kelurahan Rejowinangun Utara.
3. Kecamatan Magelang Selatan terdiri dari Kelurahan Jurangombo Selatan, Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Magersari, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Selatan dan Kelurahan Tidar Utara.

2.1.5. Penduduk

Perkembangan penduduk Kota Magelang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tabel 2.1 terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2016 yaitu 132662 jiwa.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Magelang tahun 2016

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	L	P	
Total	65375	67287	132662
0 – 4	4071	3822	7893
5 – 9	4833	4562	9395
10 – 14	5139	4923	10062
15 – 19	5268	5037	10305
20 – 24	5330	5003	10333
25 – 29	4812	4576	9388
30 – 34	5056	4810	9866
35 – 39	5270	5251	10521
40 – 44	4954	5098	10052
45 – 49	4935	5316	10251
50 – 54	4261	5116	9377
55 – 59	3850	4283	8133
60 – 64	3156	3146	6302
65 – 69	1679	2079	3758
70 – 74	1179	1732	2911
75+	1582	2533	4115

Sumber : DISPENDUKCAPIL Kota Magelang

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Magelang sebesar 132.662 jiwa yang terdiri dari 6.5375 jiwa penduduk laki-laki dan 67.287 jiwa penduduk perempuan. Komposisi jumlah penduduk Kota Magelang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk lakilaki. Hal ini mengindikasikan perlunya kegiatan pemberdayaan perempuan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya

perempuan serta meningkatkan kapasitas diri perempuan sebagai upaya untuk menuju pembangunan berkelanjutan.

2.1.6. Kesejahteraan Sosial

Salah satu peran pemerintah Kota Magelang dalam pembangunan antara lain meningkatkan mutu kualitas pendidikan dan kesehatan. Kota Magelang merupakan daerah dengan pendidikan yang paling maju di Karesidenan Kedu, bahkan di Jawa Tengah pun dapat bersaing dengan kota-kota maju lainnya seperti Semarang dan Surakarta . Kota Magelang selalu menduduki peringkat 3 besar di Jawa Tengah dan dan bahkan dalam skala Nasional berhasil mengalahkan daerah-daerah lain yang cukup favorit. Di Kota Magelang terdapat sejumlah institusi pendidikan ternama di antaranya, SMP Negeri 1 Magelang, SMP Negeri 2 Magelang, SMP Negeri 7 Magelang, SMA Negeri 1 Magelang, SMA Negeri 3 Magelang ,SMA Taruna Nusantara Magelang, SMK Negeri 1 Magelang, dan Akademi Militer (AKMIL) yaitu sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat bernama Akademi Angkatan Darat (dahulu AKABRI). AKMIL merupakan tempat seleksi Tiga Angkatan TNI sebelum diterima di AAD (Magelang), AAU (Yogyakarta) dan AAL (Surabaya). Perguruan tinggi swasta lainnya adalah: Universitas Muhammadiyah Magelang (termasuk Akademi Kebidanan Muhammadiyah, Akademi Keperawatan Muhammadiyah, dan Politeknik Muhammadiyah), serta STMIK Bina Patria serta Akademi Tirta Indonesia yang merupakan akademi tirta satu-satunya di Indonesia. Selain itu juga terdapat perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Tidar Magelang, yang statusnya beralih dari perguruan tinggi swasta menjadi

perguruan tinggi negeri dideklarasikan pada tanggal 1 April 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah Kota Magelang juga melakukan peningkatan mutu kualitas terhadap kesehatan yaitu dengan menyediakan sarana kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas dengan mudah dan biaya yang relatif murah. Sarana kesehatan yang terdapat di Kota Magelang antara lain berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan tenaga kesehatan. Pada tabel 2.2 terlihat jumlah fasilitas kesehatan di Kota Magelang tahun 2016.

Tabel 2.2 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Magelang tahun 2016

Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Jiwa	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Dokter	Perawat
Magelang Utara	2	-	-	1	5	74	818
Magelang Tengah	2	-	1	2	3	52	299
Magelang Selatan	1	1	-	2	4	21	131
Jumlah	5	1	1	5	12	147	1117

Sumber : BPS Kota Magelang tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas terdapat 5 rumah sakit umum di Kota Magelang yaitu masing – masing di Kecamatan Magelang Utara terdapat 2 rumah sakit umum, Kecamatan Magelang Tengah terdapat 2 rumah sakit umum dan terdapat 1 rumah sakit umum di Kecamatan Magelang Selatan , sedangkan hanya ada 1

rumah sakit bersalin di Kota Magelang meskipun demikian pemenuhan puskesmas, rumah sakit umum dan keberadaan bidan sudah dapat dipenuhi di seluruh wilayah kecamatan Kota Magelang.

Selain sarana kesehatan, tersedia pula sarana tempat ibadah, tempat ibadah di Kota Magelang pada tahun 2016 mencapai 392 buah terdiri dari masjid sebanyak 153 buah (39,03%), musholla sebanyak 210 buah (53,57%), gereja kristen sebanyak 23 buah (5,87%), gereja katolik sebanyak 2 buah (0,51%), dan Vihara sebanyak 2 buah (0,51%) serta sarana ibadah lainnya 2 buah (0,51%)

2.1.7. Perkembangan Restoran di Kota Magelang

Restoran merupakan sebuah usaha yang dikelola seseorang dan selalu dicari oleh masyarakat untuk suatu kebutuhan. Hal tersebut membuat para penyedia jasa restoran harus bersaing dengan memberikan ide-ide kreatif serta inovatif mulai dari konsep restoran, bahan dasar yang digunakan, pemilihan lokasi yang bagus, hingga harga yang bersaing. Salah satu daerah yang restorannya sedang berkembang yaitu di Kota Magelang. Jumlah restoran di Kota Magelang meningkat pada tahun terakhir yaitu tahun 2016. Banyak usaha restoran yang di kelola dari tahun ke tahun hingga terdapat usaha restoran baru merupakan perkembangan restoran di Kota Magelang. Namun tidak memungkiri adanya beberapa restoran yang tutup. Hal ini tidak terlalu berpengaruh karena jumlah usaha restoran yang baru buka cukup banyak

Kota Magelang terletak pada posisi strategis yaitu berada di persilangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang, Yogyakarta dan Purworejo serta berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta, Borobudur dan Kopeng. Dengan demikian jumlah restoran/ rumah makan di Kota Magelang cukup banyak. Terdapat juga sentra kuliner di dukung oleh Walikota Magelang. Sentra Kuliner pertama yang dikembangkan oleh Walikota Magelang bernama Tuin Van Java dan berlokasi di sisi utara Alun-Alun Kota Magelang. Awal dari pembangunan pusat kuliner ini adalah perencanaan Walikota Magelang dalam menata dan menampung pedagang kaki lima di Kota Magelang agar lebih teratur. Sentra kuliner yang menampung pedagang kaki lima di kawasan Kota Magelang pun tidak hanya Tuin Van Java, sentra kuliner lainnya antara lain Kuliner Sigaluh yang berlokasi di Jalan Sigaluh, Kuliner Sejuta Bunga yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman, Kuliner Kartika Sari di Jalan Ahmad Yani, Kuliner Daha yang berada di sepanjang Jalan Daha, Kuliner Jendralan, Kuliner Puri Boga Kencana di Kebonpolo, Kuliner Badaan yang berada di sisi Taman Badaan, dan Mega Kuliner and Cafe. Sentra – sentra kuliner tersebut di buka sampai larut malam di karenakan banyak para wisatawan yang sering meluangkan waktu untuk makan malam dan beristirahat sejenak di sentra kuliner Kota Magelang.

2.2 Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Magelang

Pembangunan Kota Magelang tak lepas dari campur tangan pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola sumber – sumber potensi yang ada di Magelang. Salah satu badan yang membantu pemerintah dalam mengupayakan peningkatan pembangunan tersebut yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi serta otonomi fiskal maka daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak atau retribusi dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, menjadi tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang selaku perangkat daerah untuk membantu pemerintah Kota Magelang dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Visi BPKAD Kota Magelang yaitu :

“Terwujudnya pengelolaan keuangan yang profesional, akuntabel dan transparan”.

Sedangkan Misi BPKAD Kota Magelang yaitu :

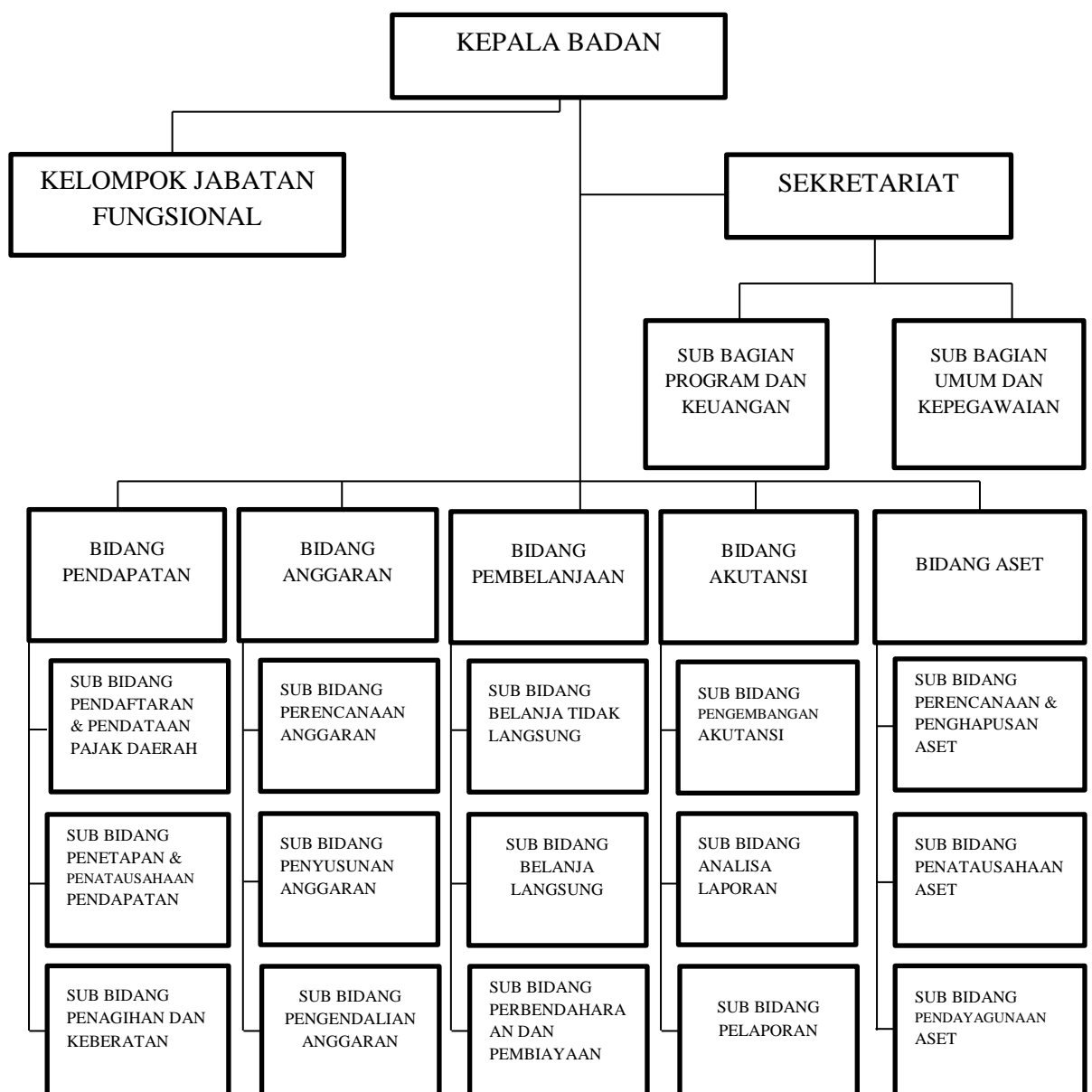
1. Mewujudkan aparatur Pengelola Keuangan daerah yang profesional, akuntabel dan transparan.
2. Mengembangkan sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
3. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah.

2.2.1. Struktur dan Fungsi Tugas Pokok BPKAD

Berdasarkan Tugas Pokok dan wewenang masing-masing jabatan di BPKAD Kota Magelang dapat dijelaskan menggunakan bagan. Struktur organisasi BPKAD Kota Magelang diperlukan sebagai sarana untuk menunjang peningkatan kemampuan dan fungsi organisasi, serta memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban sekaligus mencerminkan pembagian tugas dan wewenang dalam suatu organisasi kedinasan selanjutnya, aliran kekuasaan dan tanggung jawab bercabang dalam setiap tingkat unit kerja. Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hierarki. Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik secara vertical maupun horizontal.

Organisasi yang dimaksud untuk membina keharmonisan kerja, agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara teratur dan penuh tanggung jawab. Sehingga rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Magelang



2.2.2 Tugas dan Fungsi Jabatan

Kekuasaan tertinggi terletak pada Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah membawahi 6 (enam) kepala sub dinas yaitu:

1. Sekretariat

Sekertaris mempunyai tugas pokok membantu kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan dinas. Sekertaris membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala sub bagian program dan keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretariat dalam menyusun rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya

2) Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian

Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administratif kepegawaian di lingkungan dinas.

2. Kepala Bidang Pendapatan

Kepala bidang pendapatan asli daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah dalam bidang pendapatan asli daerah. Kepala pendapatan asli daerah membawahi 3 (tiga) sub bagian:

1) Sub bagian pendaftaran dan pendataan pajak daerah.

Sub bagian pendaftaran dan pendataan pajak daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pendapatan dalam sub bidang pendaftaran, pendataan

2) Sub bidang penetapan dan penatausahaan pendapatan.

Sub bidang penetapan dan penatausahaan pendapatan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pendapatan dalam penetapan dan pemungutan pajak daerah, pengkoordinasian dan pengendalian retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

3) Sub bidang penagihan dan keberatan.

Sub bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pendapatan dalam sub bidang keberatan, angsuran dan pendapatan.

3. Kepala Bidang Anggaran

Kepala bidang anggaran mempunyai tugas pokok membantu kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah dalam bidang anggaran dan mempunyai fungsi yaitu perencanaan penyusunan program,

pengkoordinasian pelaksanaan program, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian program serta kegiatan bidang anggaran. Kepala bidang anggaran membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

1) Sub bidang perencanaan anggaran.

Sub bidang perencanaan anggaran mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang anggaran dalam sub bidang perencanaan anggaran

2) Sub bidang penyusunan anggaran.

Sub bidang penyusunan anggaran tugas pokok membantu kepala bidang anggaran dalam sub bidang penyusunan anggaran

3) Sub bidang pengendalian anggaran.

Sub bidang pengendalian anggaran mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang anggaran dalam sub bidang pengendalian anggaran.

4. Kepala Bidang Pembelanjaan

Kepala bidang pembelanjaan mempunyai tugas pokok membantu kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah dalam bidang pembelanjaan. Kepala bidang pembelanjaan membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

1) Sub bidang belanja tidak langsung

Sub bidang belanja tidak langsung mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pembelanjaan dalam sub bidang belanja tidak langsung

2) Sub bidang belanja langsung

Sub bidang belanja langsung mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pembelanjaan dalam sub bidang belanja langsung

3) Sub bidang perbendaharaan dan pembiayaan

Sub bidang perbendaharaan dan pembiayaan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pembelanjaan dalam sub bidang perbendaharaan dan pembiayaan.

5. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala bidang akuntansi mempunyai tugas pokok membantu kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah dalam bidang akuntansi. Kepala bidang akuntansi membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

1) Sub bidang pengembangan akuntansi

Sub bidang pengembangan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang akuntansi dalam sub bidang pengembangan akuntansi

2) Sub bidang analisa laporan

Sub bidang analisa laporan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang akuntansi dalam sub bidang analisa laporan

3) Sub bidang pelaporan

Sub bidang pelaporan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang akuntansi dalam sub bidang pelaporan.

6. Kepala bidang aset

Kepala bidang aset mempunyai tugas pokok membantu kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah dalam bidang aset. Kepala bidang aset membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

1) Sub bidang perencanaan dan penghapusan aset

Sub bidang perencanaan dan penghapusan aset mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang aset dalam sub bidang perencanaan dan penghapusan aset

2) Sub bidang penatausahaan aset

Sub bidang penatausahaan aset mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang aset dalam sub bidang penatausahaan aset

3) Sub bidang pendayagunaan aset

Sub bidang pendayagunaan aset mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang aset dalam sub bidang pendayagunaan aset.